BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Gerakan ASNLF dalam upayanya membebaskan Aceh dari Indonesia, belum mampu menarik aktor-aktor kuat dalam menyepakati komitmen bersama dari keinginan jaringan advokasi ini. Penelitian ini melakukan analisis terhadap upaya ASNLF dalam membebaskan Aceh dari Indonesia, terutama mempengaruhi 'aktor target' seperti Pemerintah, Organisasi Internasional, NGO maupun lainnya. Dalam menganalisis hal tersebut, penelitian ini menggunakan teori "*Transnational Advocacy Network*" yang merunut awal mulanya kemunculan jaringan advokasi, lalu taktik gerakan hingga menjelaskan hasil pencapaian gerakan ASNLF.

Skema pola bumerang telah membuktikan faktor terbentuknya jaringan advokasi transnasional Gerakan ASNLF. Munculnya masalah yang di advokasikan adalah ingin membebaskan Aceh dari Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri memblokir aktivitas gerakan ini. Lalu, ASNLF bersuara atas dasar hukum internasional di bawah Resolusi PBB 1974 yang menyatakan self-determination yaitu hak menentukan nasib sendiri. Sedangkan, dukungan dari negara pendukung belum secara tegas untuk berani menyatakan dengan resmi bahwa kemerdekaan Aceh legal. Namun usahanya tersebut tidak sampai pada titik itu, ASNLF mencoba mendekat kepada aktor internasional lainnya seperti UNPO. Peran UNPO sendiri memberikan ruang kepada Gerakan ASNLF untuk terus menyuarakan aspirasi dalam membebaskan Aceh dari Indonesia. Pola ini telah mengidentifikasi bahawa ASNLF sebagai jaringan advokasi, kendati mereka belum mendapatkan dukungan

dari negara lain. Akan tetapi, ASNLF sudah menjalankan seluruh skema dari pola boomerang tersebut.

Selanjutnya, diikuti oleh dua faktor lainnya yakni; adanya political entrepreneurs sebagai aktor penting dalam terbentuknya sebuah jaringan advokasi dan yang menjalankan proses dari upaya Gerakan ASNLF dalam membebaskan Aceh. Walaupun di pertengahan jalan, para aktivis ini yang membentuk parsial faksi-faksi di tubuh Gerakan ASNLF. Lalu, international conference and international organization yang membantu kemunculan ASNLF dalam menyuarakan aspirasinya di arena internasional. Komunikasi internasional ini sebagai upayanya ASNLF menarik sorotan dunia atas keinginannya untuk membebaskan Aceh dari Indonesia. Di sisi lain, penelitian ini meneruskan analisis dari aktivitas Gerakan ASNLF dalam strateginya untuk mewujudkan advokasi masalahnya yang mereka perjuangkan. Dengan menggunakan tipologi taktik Keck & Sikkink yakni Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics and Accountability Politics.

Sebagaimana taktik politik tersebut menjabarkan jika mula-mula ASNLF sangat fluktuatif dalam membentuk sebuah isu dari awal 1999-2005 dominan meningkat dan meredup di fase 2012-2019. Usaha Gerakan ASNLF dalam membingkai sebuah isu setidaknya telah menarik perhatian domestik dan internasional, terutama membuka jalannya dialog. Bersinambungan dengan upayanya memainkan simbol-simbol semiotika yang berkaitan dengan membangun nasionalisme masyarakat terhadap masalah yang diadvokaskan dan tentunya juga untuk menumbuhkan jaringan ASNLF.

Untuk dinamika taktik selanjutnya juga mengalami naik turun, seperti *moral* leverage dan material leverage dalam membantu menekan Pemerintah Indonesia dan menarik dukungan materi dari masyarakat. Usaha ASNLF di fase pertama belum solid dalam membentuk sekutu internasional untuk dapat membantu pergerakan ini, kendati di fase kedua upaya tersebut sudah mulai terbentuk namun masih membutuhkan waktu dalam menarik kembali simpati masyarakat. Sedangkan, dukungan dana dari masyarakat sangat signifikan dalam mempengaruhi bertumbuh jaringan ini di fase pertama, namun berbalik di fase kedua dalam kaitannya dengan dukungan materi tidak menampung jumlah yang besar.

Berdasarkan taktik-taktik di atas, akuntabilitas politik dari ASNLF belum terwujud dalam wacananya membentuk komitmen bersama dengan Pemerintah Indonesia, terkhusus keinginannya untuk membebaskan Aceh dari Indonesia. Dari taktik-taktik tersebut, penelitian ini telah mengidentifikasi pencapaian gerakan ini. Gerakan ASNLF di antara dua fase tersebut hanya mampu memenuhi satu dari lima penilaian pencapaian dari jaringan advokasinya. Adapun, satu hal tersebut dari Fase Hasan Tiro memenuhi poin pertama yaitu membentuk isu dalam usahanya memprovokasi khalayak umum terutama menarik sorotan dunia internasional dan domestik. Selanjutnya, Fase Arif Fadillah memenuhi poin kedua yaitu posisi diskursif ASNLF dengan 'aktor target' seperti Pemerintah Indonesia, UNPO dan PBB telah tersampaikan pengaruh dari adanya pergerakan ini untuk membebaskan diri dari Indonesia.

Dengan demikian, ketiga penilaian lainnya seperti prosedur kelembagaan, pembentukan wacana komitmennya untuk membebaskan diri dari Indonesia dengan 'aktor target' dan merubah perilaku negara dalam urusannya untuk

menerima keinginan dari ASNLF belum tercapai dari kedua fase tersebut. Keseluruhan bab dalam skripsi ini telah menganalisa Gerakan ASNLF dalam upayanya membebaskan Aceh dari Indonesia pada tahun 1999-2019, menghasilkan kesimpulan jika klaim Gerakan ASNLF saat ini belum beresonansi kembali secara global seperti Pra MoU Helsinki. Sebab, gerakan ini mengalami penurunan yang signifikan dari proses aktivitas pergerakannya selama perjanjian damai MoU Helsinki terjadi.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan dari hasil analisis dan kesimpulan penelitian ini telah mejabarkan indikator pencapaian dan sebab-sebab yang menghambat Gerakan ASNLF dalam mempengaruhi Indonesia untuk menyetujui Aceh lepas dari wilayahnya. Namun, penulis memberikan rekomendasi terkait penelitian ini agar kajian selanjutnya untuk topik dan pembahasan yang sama melihat upaya dari Gerakan ASNLF dalam membebaskan Aceh dari Indonesia dari sisi kestabilitasan organisasi atau jaringan advokasi dalam menumbuhkembangkan perjuangan mereka. Sebagaimana nantinya akan menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai hambatan dan evaluasi dari usaha Gerakan ASNLF ini untuk membebaskan Aceh dari Indonesia.